

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI PADA ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN**



OLEH :

ADILA YULISTIA

NIM. 031811133206

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

2022

HALAMAN PENGESAHAN
PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk Mencapai Gelar

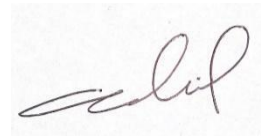
Sarjana Hukum

DOSEN PEMBIMBING



Prilian Cahyani, S.H, S. AP., M.H.
NIP 198304252010122004

PENYUSUN



Adila Yulistia
NIM 031811133206

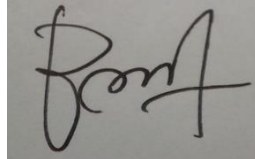
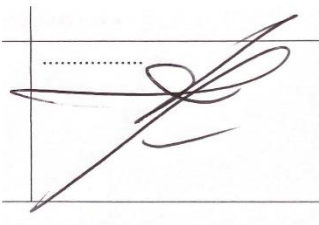
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
2022

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Tim Penguji Pada Hari Kamis, tanggal 21

April 2022

Tim Penguji Skripsi :

Ketua	:	Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H.	
Anggota	:	1. Dr. Intan Inayatun Soeparna, S.H., M.Hum.	
	:	2. Prilian Cahyani, S.H., S.AP., M.H., LL.M.	
	:	3. Brahma Astagiri, S.H., M.H.	
	:	4. Masitoh Indriani, S.H., LL.M.	

PERNYATAAN ORISINALITAS**PERNYATAAN ORISINALITAS**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : ADILA YULISTIA

NIM : 031811133206

Bidang Minat : Peradilan

Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI
PADA ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi yang lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 11 April 2022



ADILA YULISTIA

NIM 031811133206

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karuniaNya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik sebagai salah satu syarat kelulusan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Airlangga. Penelitian ini tidak akan ada tanpa adanya dukungan dari banyak pihak, Maka dari itu, dalam kesempatan ini Penulis ingin menyampaikan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga beserta jajarannya.
2. Ibu Prilian Cahyani, S.H, S. AP. selaku Dosen Pembimbing Skripsi Penulis yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan Penulis dengan sangat sabar.
3. Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H. selaku Ketua Penguji, Bu Dr. Intan Inayatun Soeparna., S.H., M.Hum., Bu Prilian Cahyani, S.H., S.AP., M.H. Pak Brahma Astagiri., S.H., LL.M. dan Bu Masitoh Indriani, S.H., LL.M. selaku Anggota Penguji Skripsi saya yang telah memberikan kritik dan saran saat ujian skripsi.
4. Bapak Dr. Maradona, S.H., LL.M selaku Dosen Wali Penulis yang telah bersedia membimbing Penulis selama Penulis menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah memberikan ilmu serta pengalaman
6. Seluruh pegawai dan staff Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah membantu saya dalam urusan kampus serta organisasi.

7. Keluarga Penulis, Bapak Bambang Sulistiawan sebagai bapak yang hebat dan sabar, Ibu Yuyun sebagai ibu yang hebat dan kuat, Adek Figo sebagai adek yang sabar serta seluruh keluarga besar Penulis.
8. Alm. H. Soeharto, S.H., M.Hum. sebagai Kakek sekaligus *role model* Penulis dalam kehidupan Penulis. *I did it well Eyang To*, maaf telat ngasih SHnya, *you'll be proud of me up there*.
9. Sahabat serta *Support System* dalam hidup Penulis, Annisa Amelinda Sofiani.
10. Sahabat Penulis di rumah : Vivi, Dhea, Tina, dan Mesy.
11. Sahabat Penulis semenjak duduk di bangku SMP : Larasati Setyo, Amaris Zahwa, Alvisa Talitha, Anastyasya Dyah, Niken Ayu, Radissa Nadia, Savanna Salwa, dan Renza Wira.
12. Sahabat Penulis semenjak duduk di bangku SMA : Annisa Amelinda, Anisa Rachmadya, Nadya Reza dan Dinda Zalfa.
13. Sahabat Penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Airlangga : Astrid Aurelia, Marsa Maghfirah, Nadia Kamilah, Yoshe Agatha, Sonia, Sherin Nadya, Athalia Salsabila.
14. Sahabat serta rekan organisasi GMNI FH UNAIR, pejuang tomat.
15. Sahabat serta rekan kerja SMHI FH UNAIR 2019 Rizqullah Dany, Fahriza Nadiastari, Marsa Maghfirah.
16. Sahabat serta rekan berpikir Adriel Dito, mas Ronald Pamungkas, mbak Puspita.
17. Seluruh manusia yang pernah hadir dalam hidup Penulis.

Akhir kata, Penulis mengucapkan terimakasih dan mohon maaf atas penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan apabila terdapat pihak-pihak yang tidak tercantum pada penelitian ini, besar harapan Penulis dengan ada penelitian ini dapat bermanfaat untuk perkembangan ilmu hukum kedepannya.

ABSTRAK

Seiring dengan berkembangnya zaman data pribadi menjadi sebuah hal yang krusial untuk digunakan di berbagai aspek kehidupan. Penggunaan data pribadi dapat mempermudah pemilik data pribadi maupun penyelenggara sistem elektronik, akan tetapi jika tidak diatur dengan benar maka akan dapat menimbulkan penyalahgunaan data pribadi yang dapat merugikan pemilik data pribadi. Terlebih dalam penggunaan data kependudukan yang mana banyak menjadi syarat dalam mendapat layanan publik maupun layanan swasta, kerap terjadi tindak pidana administrasi kependudukan yang mana berkaitan dengan data pribadi. Sehingga Penulis dalam penelitian ini melakukan penelitian mengenai pengaturan data pribadi di Indonesia dan pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana administrasi kependudukan terkait data pribadi dengan tujuan menganalisis dan menemukan definisi data pribadi dan menganalisa pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana administrasi kependudukan terkait data pribadi. Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan *statute approach*, dan *conceptual approach*, yang mana memberikan tujuan untuk menganalisa dan menemukan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana administrasi kependudukan terkait data pribadi. Hasil dari penelitian ini yaitu perlindungan hukum terhadap data pribadi masih bersifat sektoral. Pelaku tindak pidana administrasi kependudukan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Diharapkan RUU PDP segera disahkan agar dapat menjadi perlindungan hukum terhadap data pribadi.

Kata Kunci : Data Pribadi, Data Kependudukan, Tindak Pidana Administrasi Kependudukan, Pertanggungjawaban Pidana

ABSTRACT

Along with the development of the era, personal data has become a crucial thing for used in various aspects of life. The use of personal data can make it easier for data subject and electronic system administrators, but if they are not well regulated then it will lead to misuse of personal data which can harm data subject. Until now, Indonesia does not have a specific regulation regarding the protection of personal data, the laws and regulations in Indonesia are only limited to a sectoral regulation. Especially in the use of population data, which is a requirement in obtaining public and private services, criminal acts of population administration often occur which are related to personal data. So, the Author in this study conducted research on the regulation of personal data in Indonesia and criminal liability for criminal acts of population administration related to personal data with the aim of analyzing and finding the definition of personal data and analyzing criminal liability for criminal acts of population administration related personal data. This legal research uses statute approach and conceptual approach which aims to analyze and determine criminal liability for criminal acts of population administration related personal data. The result of this research is that personal data protection is still sectoral. Perpetrators of criminal acts of population administration can be held criminally responsible. It is hoped that RUU PDP can be passed so it can become a personal data protection.

Keywords : *Personal Data, Data Population, Population Administration Crime, Criminal Liability.*

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Metode Penelitian	8
1.5.1 Tipe Penelitian	8
1.5.2 Pendekatan	8
1.5.3 Bahan Hukum	9
1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	12
1.5.5 Analisis Bahan Hukum	12
1.6 Pertanggungjawaban Penulisan	12
BAB II	14
KLASIFIKASI DATA PRIBADI MENURUT UNDANG-UNDANG DI INDONESIA	14

2.1 Pengertian Data Pribadi	14
2.1.1 Pengertian Data Pribadi Menurut Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan	20
2.1.2 Pengertian Data Pribadi Menurut Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran	22
2.1.3 Pengertian Data Pribadi Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan	23
2.1.4 Pengertian Data Pribadi Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Jo. Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	25
2.2 <i>Ius Constituendum</i> Perlindungan Data Pribadi di Indonesia	27
2.2.1 Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi	29
BAB III	31
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA	
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	31
3.1 Konsep Pertanggungjawaban Pidana	31
3.2. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Administrasi Kependudukan	
Terkait Data Pribadi	34
3.2.1 Pertanggungjawaban Menurut Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan	35
BAB IV	45
PENUTUP	45
4.1 Kesimpulan	45
4.2 Saran	46
DAFTAR BACAAN	47

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354)

Peraturan Menteri Komunikasi Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829)

Permenkes No. 269/MENKES/PER/III/2008 Tentang Rekam Medis

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.07/2014 Tentang
Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen

Organisation Economic Co-operation Development Privacy Guideline

Data Protection Act United Kingdom 2018

Personal Information Protection Act South Korea 2011

Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi